

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **( K A K )**

---

1. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
2. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2019

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Setiap proses penyusunan dokumen pelaksanaan Kegiatan memerlukan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

##### **B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2019 adalah sebagai pendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan tujuan untuk menyediakan pembayaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

##### **C. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: Pembayaran rekening Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional kebutuhan kantor/dinas selama satu tahun anggaran (12 bulan)

#### **II. PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **A. Lokasi**

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2019 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

## B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembayaran Rekening Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional kebutuhan rutin kantor/dinas.

## C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran/Pengguna barang : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbag Umum & Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
5. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
6. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

## D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2019 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden RI 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 06 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Bupati Nomor : 900/72/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 18 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 06 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2019 tanggal 5 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/05/Kpts-DSPPrPA-PS/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2019 tanggal 5 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2019).

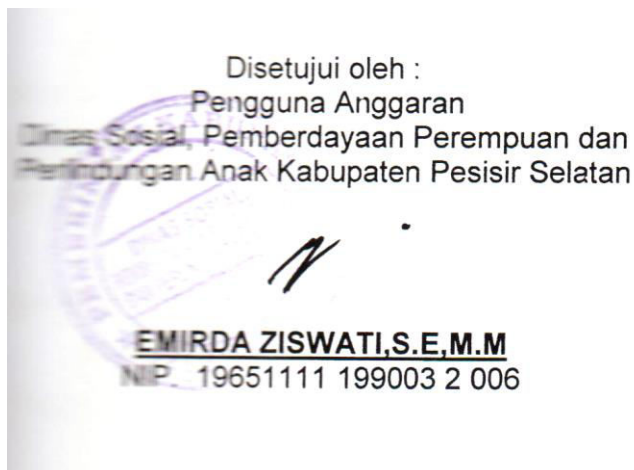
F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2019 terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA-SKPD : 1.01.1.01.06.01.02.24. dengan jumlah sebesar Rp 251.340.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

## SASARAN KINERJA TAHUN 2019

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
2. Masukan / Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp. 251.340.000,-
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan ( Januari – Desember 2019)
3. Keluaran / Output :
  - ❖ Terlaksananya Perbaikan Kendaraan Dinas/ Operasional.
4. Hasil / Result / Outcomes :
  - ❖ Tersedianya Sarana Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Baik
5. Manfaat / Benefit :
  - ❖ Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk selama 12 bulan (1 tahun)
6. Dampak :
  - ❖ Lancarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.



Painan, Januari 2019  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**HARTETI, SH**  
NIP. 19730302 200701 2 012